

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

1. Fenomena Organisasi Papua Merdeka

Nama Organisasi Papua Merdeka atau yang sering disebut OPM merupakan nama yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada setiap kelompok, organisasi, atau faksi yang berada di Papua maupun di luar negeri dan dipimpin oleh orang-orang Papua yang pro terhadap kemerdekaan Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara orang Papua dan Indonesia dimulai dan kian menguat setelah Belanda menyiapkan rencana pembangunan sepuluh tahun untuk Papua dan memublikasikannya tahun 1960 di Rotterdam. Guna memuluskan rencana pembangunan tersebut Belanda memprioritaskan pembangunan kesadaran politik rakyat Papua, karena itu pada 1961 jabatan yang resmi dipegang oleh orang Papua sekitar 52% dan diharapkan pada tahun 1970 akan meningkat menjadi 95% dan persiapan pembentukan Dewan Nieuw Guinea pun terus dilakukan, hingga akhirnya terbentuk pada 5 April 1961 (Pekey, 2018, hal. 34). Belanda juga mengizinkan para tokoh Papua yang pro-Belanda untuk mengadakan sidang komite nasional pada 19 Oktober 1961. Pada sidang tersebut akhirnya disetujui simbol-simbol politik, seperti bendera bintang kejora (yang kini digunakan sebagai simbol OPM), lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", nama negara "Papua Barat", dan lambang negara "Burung Mambruk". Kemudian untuk pertama kalinya pada 1 Desember 1961 bendera Bintang Kejora, bendera nasional

negara Papua Barat dikibarkan sejajar bersama bendera Belanda dengan iringan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” yang dinyanyikan dihadapan ratusan orang Papua dan beberapa orang Belanda yang menjabat menjadi pengurus pemerintahan di Papua (Sefriani, 2003, hal. 43). Melihat kejadian tersebut, saat itu Indonesia merespon keras hingga Presiden Soekarno melalui pidatonya mengumumkan Trikora yang berisi agar rakyat Indonesia harus membebaskan Irian Barat dari Kolonial Belanda.

Konflik yang semakin memanas antara Hindia Belanda dan Indonesia yang memperebutkan Papua berakhir dengan persetujuan New York 1962. Belanda menyerahkan Papua ke UNTEA yang selanjutnya pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkannya kepada Indonesia. Namun dalam persetujuan tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia harus menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 (Ari Sujito; Dkk, 2009, hal. 45). Situasi dalam selang waktu antara 1963 hingga 1969 ini sebenarnya cukup tegang, dimana dari aktivis kritis Papua banyak sekali yang melakukan demonstrasi dan gerakan-gerakan protes terhadap pemerintah Indonesia. Mereka mengaku bersama rakyat Papua yang lain menolak klaim Indonesia dan menuntut hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Indonesia saat itu merespon dengan menambah jumlah pasukan militer yang beroperasi di Papua, dan melakukan penangkapan kepada banyak masyarakat, tokoh dan aktivis Papua. Buntutnya, pada 28 Juli 1965 terjadi perlawanan besar-besaran yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom di Asrama Militer Arfai. Perlawanan ini dilakukan secara intensif dengan pola gerilya di hutan (Djopari, 1995,

hal.110). Nama OPM ini kerap bergantian dengan nama yang sering pihak militer pakai yakni Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) untuk menyebutkan kelompok-kelompok yang kerap mengganggu jalannya pemerintahan. Perlawanan masyarakat Papua dan OPM terus meluas di seluruh wilayah Papua. Aspek-aspek seperti aspek politik, ekonomi, psikologis, sosial dan ideologis dianggap menjadi alasan OPM dalam melakukan perlawanan dalam mewujudkan kemerdekaan Papua Barat.

Terdapat rentetan aksi penyerangan yang dilakukan OPM baik fisik dan non fisik, antara lain ada 17 peristiwa besar perlawanan bersenjata, 2 peristiwa penyanderaan, 4 peristiwa demonstrasi massa, 4 peristiwa pengibaran bendera, serta berbagai aksi ajakan dan propaganda melalui pamflet dan selebaran. Puncak dari perlawanan pada masa integrasi ini adalah ketika pelaksanaan Pepera pada tahun 1969. Dimana banyak sekali daerah-daerah yang menjadi titik aksi demonstrasi massa, antara lain Merauke, Nabire, Fakfak, dan Manokwari (Pekey, 2018, hal. 47). Namun aksi-aksi tersebut masih dapat diantisipasi oleh pihak keamanan militer sehingga tidak meluas. Setelah kejadian ini, banyak tokoh politik, aktivis, dan masyarakat kritis Papua yang ditangkap dengan alasan menjadi penyebab timbulnya konflik di Papua.

Pada tahun 2003 pemerintahan yang kala itu dipimpin oleh Presiden Megawati menerbitkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2003 yang terdapat poin memekarkan provinsi Papua. Pemerintah pusat saat itu berniat ingin meredam perlawanan masyarakat Papua dan menghancurkan identitas kepapuaan yang selama

ini menjadi nafas perlawanan serta meminggirkan kelompok-kelompok politik yang mengatasnamakan rakyat Papua (Rahab, 2010, hal. 9). Namun pemerintah Indonesia nampaknya kurang memperhatikan tentang identitas Papua sebagai perlawanan atas Indonesia telah tertanam begitu mendalam dan meluas pada hamper di semua wilayah Papua. Identitas perlawanan dalam kelompok-kelompok Papua tumbuh karena adanya sikap diasingkan (*alienation*) dan kemarahan atas pengucilan dari Indonesia, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Ketidakpercayaan inilah yang kemudian menghambat proses resolusi konflik di Papua dan malah menimbulkan wacana separatisme melawan NKRI. Hingga saat ini bentuk-bentuk perlawanan masyarakat Papua dan OPM masih terus ada baik dalam bentuk perlawanan bersenjata, maupun perlawanan tanpa senjata seperti demonstrasi massa, pencarian dukungan lewat diplomasi pada negara luar, dan juga pengibaran bendera bintang kejora. Aksi-aksi perlawanan tanpa senjata ini seringkali dilakukan oleh para aktivis dan masyarakat Papua selain sebagai wujud kebebasan berekspresi, aksi-aksi tersebut juga dapat dimaknai sebagai wujud kebingungan orang Papua asli atas rumitnya persoalan yang tak kunjung jelas penyelesaiannya, serta untuk menunjukkan sikap resisten mereka terhadap NKRI.

2. Media dan Papua

Tanah Papua nampaknya masih menjadi asing bagi media massa dan juga para pemburu berita. Tak banyak jenis informasi yang bisa didapat mengenai berita tentang Papua, karena berita yang ditampilkan oleh beberapa media biasanya

cenderung seragam, jika tidak tentang pembangunan Papua, berarti tentang konflik atau teror yang terjadi di Papua. Mungkin telah banyak kajian yang mengkritik cara pemerintah Indonesia dalam membatasi kerja-kerja jurnalis dalam memberikan informasi yang lebih terang soal Papua. Namun, hampir semua kritik tersebut ditenangkan oleh “alasan keamanan” yang rutin dijadikan alibi oleh pemerintah selama puluhan tahun untuk menghalangi kerja pers dan penelitian. Sehingga pengetahuan tentang kondisi Papua menjadi sangat minim dan rumpang, terutama bagi banyak orang yang tinggal di luar Papua.

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Change.org yang diterbitkan awal tahun 2018 sedikit banyak mengonfirmasi tentang hal tersebut. Dalam survei tersebut disebutkan bahwa ada persepsi yang berbeda antara responden orang Papua dan orang non-Papua. Seperti contoh mengenai kondisi di Papua misalnya, terdapat 69,31% responden orang Papua “Asli” yang menyatakan “sangat khawatir” dan “khawatir”. Persepsi kekhawatiran itu berbeda tajam dengan persepsi responden orang luar Papua (41,26%) dan responden penduduk pendatang di Papua (45,52%). Sementara itu, terdapat 29,04% orang luar Papua yang menyatakan “tidak tahu” tentang situasi di Papua (Change.org, 2018).

Masih menurut survei ini, masalah terbesar di Papua bagi orang luar Papua, adalah hal-hal mengenai pendidikan (14,33%), infrastruktur (13,17%), eksploitasi sumber daya alam (12,58%), dan akses ekonomi (10,48%). Persepsi ini sungguh sangat berbeda bila dibandingkan dengan persepsi orang Papua asli, yang

menganggap masalah utama yang mereka miliki adalah masalah mengenai pelanggaran HAM (14,02%), pendidikan (9,8%), dan korupsi (7,73%). Perbedaan persepsi ini menjadi bukti statistik mengenai adanya ketimpangan pengetahuan antara orang Papua dengan orang luar Papua mengenai kondisi dan situasi yang tengah terjadi di Papua.

Perihal kebebasan pers di Papua, sepertinya masih terus menjadi koreksi bagi pemerintahan Indonesia sejak tahun 1969. Bahkan, keterbatasan akses media di Papua sudah berlangsung tiga tahun sebelumnya atau sejak tahun 1963. Tepatnya setelah Perjanjian New York 1962 yang menyatakan Papua kembali ke pangkuan Indonesia melalui UNTEA, tak lama Presiden Soekarno mengeluarkan dua dekrit tentang larangan terhadap semua partai politik Papua dan juga melarang semua aktivitas dan kegiatan politik yang tidak disetujui oleh pihak berwenang. Karantina politik ini juga berarti bahwa wilayah itu tertutup bagi dunia luar sehingga sangat sulit bagi orang asing untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang situasi di Papua. Dalam beberapa tahun pertama, jurnalis dan akademisi sebagian besar bergantung pada laporan saksi mata dari orang-orang Papua yang menyeberang ke Papua Nugini, atau dari orang Indonesia yang mau menyampaikan informasi (Saltford, 2003, hal.74).

Praktik pembatasan pers bagi dua provinsi Papua dan Papua Barat oleh pemerintah berupa pembatasan wartawan asing, kekerasan pada jurnalis, diskriminasi terhadap jurnalis asli Papua, hingga suap masih sering terjadi di sana. Seperti yang

diberitakan pada *tirto.id* bahwasanya akses terhadap jurnalis secara umumnya ke Papua, atau khususnya Nduga, sangat terbatas. Media yang diizinkan adalah media yang bersama dengan aparat gabungan (Alaidrus, 2019, hal.1). Akses bagi pers seperti ditutup, serta media hanya bisa akses ke aparat hukum, seperti tentara, dan hal ini tentu akan memunculkan fakta yang tidak utuh kepada masyarakat. Berita-berita mengenai Papua kerap disusun seadanya terutama pada portal-portal media online, kemudian informasi yang digunakan kebanyakan berdasarkan keterangan narasumber elit yang berada di Jakarta. Data ini disampaikan oleh *remotivi.or.id*, yang memperlihatkan bahwa narasumber berita televisi pada kasus Tolikara di Papua berasal dari kepolisian dan elit (Redaksi Remotivi, 2015, hal.1). Pola pemberitaan macam demikian mengindikasikan bahwa suara dan perspektif elit dan militerlah yang menuntun publik memahami isu Papua. Hal inilah yang kemudian, salah satunya, menghalangi isu pelanggaran HAM dikenali oleh publik luas, sebab suara dan perspektif orang Papua tidak mendapat ruang.

Tak dapat dipungkiri, memang ada hambatan eksternal yang dihadapi oleh media dan wartawan untuk mengakses Papua. Misalnya soal infrastruktur di Papua—selain soal faktor keamanan dan pembatasan kebebasan pers. Namun, dan ini yang menjadi poin yang ketiga dari refleksi saya, justru situasi yang ada harus mendorong media dan wartawan untuk bersiasat mengakali keadaan melalui cara-cara inovatif demi mendengar suara orang papua, seperti misal melalui survei daring semacam yang dilakukan oleh *Change.org* dan *LIPI*.

3. Sayap Lebar Kompas

Kompas sudah menjadi salah satu surat kabar harian paling terkemuka dengan angka penjualan tertinggi di Indonesia. Didirikan oleh PK Ojong (Petrus Kanisius Ojong atau Onong Peng Koen) bersama Jakob Oetama, yang diterbitkan pertama kali pada 28 Juni 1965. Lahir lewat inisiatif Partai Katholik, Kompas muncul sebagai upaya menyuarakan suara Katholik di tengah hiruk pikuk politik Indonesia periode 1960-an. Ketika itu Kompas belum menuliskan tajuk rencana dan penggunaan iklan masih berkisar enam buah dan diletakkan kurang dari setengah halaman koran (Mallarangeng, 2010, hal. 51). Harian ini selamat dari badai politik tahun 1966 dan pada saat kelahiran Orde Baru, koran ini secara umum menunjukkan sikap mendukung. Waktu itu, sederetan tokoh Katholik sayap kanan memainkan peran penting dari balik layar sebagai kaum intelektual dan kalangan ideologis (seperti lembaga *think-tank Center of Strategic and International Studies* yang beraliansi dengan intelejen militer) (Hill, 2011, hal. 97).

Pada tahun 1971, secara umum hubungan surat kabar-partai politik merenggang seiring dengan upaya pemerintah mengikis loyalitas sektarian. Kompas sering diplesetkan namanya sebagai Komandan Pastor atau Komando Pak Seda. Hal ini dikarenakan pada masa pembentukan Kompas, tepatnya tahun 60-an, ketika itu pers di Indonesia harus memiliki afiliasi dengan partai politik. Menanggapi hal ini, Kompas kemudian berafiliasi dengan Partai Katolik, yang ketika itu diketuai oleh Frans Seda. Sekalipun kabar yang mensinyalir bahwa nama “Kompas” merupakan

singkatan “KOMando PASTor” terus saja beredar, esensi tersebut yang ada pada awalnya kini menguap (Hill, 2011, hal. 98).

Dalam perjalanannya Kompas juga pernah dilarang terbit sebanyak dua kali, yaitu pada 2 Oktober 1966 dan pada 11 Januari 1978, dikarenakan peristiwa G30S PKI dan kebijakan pemerintahan Soeharto ketika itu. Lantaran menjunjung tinggi kehati-hatian dalam setiap mengulas masalah-masalah politik sensitif, Kompas sering lolos dari banjir brebel pada periode tahun 1970-an. Sirkulasi Kompas awalnya tak besar, hanya 5.000. Akan tetapi angka penjualan Kompas kian terus menanjak seiring dengan mantapnya reputasi berkat analisa yang mendalam dan gaya penulisan berita yang tajam. Saat ini Kompas telah berkembang pesat dalam dunia pers. Bukan hanya dalam media cetak saja, namun dalam multimedia dan aktivitas lain, yang menyebabkan Kompas menjadi media yang memiliki media-empire yang baik dan kuat. Beberapa penerbitan yang dibawah oleh Kompas Gramedia Group antara lain; Tribun, Serambi Indonesia, Sriwijaya Post, Bernas, Surya, Bola, Kontan, Otomotif, Bobo, HAI, Hidup, Jakarta-Jakarta, Senang, Monitor, Nova (mingguan); Info Komputer (tengah bulanan); Intisari (bulanan) (Mallarangeng, 2010, hal. 59).

Kelompok Kompas Gramedia pun mekar dan mendominasi industri percetakan. Kelompok ini kemudian menjadi satu dari empat puluh konglomerat kelas kakap di negeri ini. Harian Kompas rutin menempati posisi paling depan untuk perolehan iklan cetak terbanyak di Indonesia, dan sepanjang tahun pun porsi tersebut

semakin besar. Pada tahun 1989, harian ini berhasil mengambil 26,8 persen porsi iklan seluruh surat kabar di Indonesia, yaitu sekitar Rp 50.258 juta (Hill, 2011: 99).

Dibandingkan dengan koran-koran lain yang sukses di pasaran, bendera Kompaslah yang paling lama berkibar sepanjang perjalanan sejarah. Kompas amat jarang mengalami pencabutan izin, bahkan penutupan sekalipun. Dengan mantap serta pasti, Kompas terus mengembangkan sirkulasinya. Kelompok Kompas-Gramedia telah menjalin relasi kerja yang erat dengan sejumlah institusi media terkait milik pemerintah. Perjalanan bisnis Kompas Gramedia tiba pada perkembangan tren di masyarakat yang menunjukkan fenomena meningkatnya penggunaan jaringan Internet untuk mendapatkan informasi. Maka, Harian Kompas membuat versi online dari edisi cetaknya yang disebut Kompas Online dengan yang kemudian menjadi salah satu unit bisnis PT Kompas Cyber Media (KCM) pada tahun 1998. Saat ini, Kompas Online bertransformasi menjadi Kompas.com.

Kompas juga meniatkan untuk menjadi perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat tedidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera. Kompas menjadikan manusia dan kemanusiaan sebagai landasan mereka dalam menerbitkan pemberitaan dan komentar pada Kompas. Visi yang kemudian coba Kompas bawa, yang oleh Jakob Oetama dikatakan menjadi dasar segala perilaku Kompas terangkum dalam slogan: "Ikut Mengembangkan Saling Pengertian dalam

Masyarakat yang Majemuk” dan “Menghibur yang Papa dan Mengingatkan yang Mapan” (Oetama, 2001, hal. 147).

Dalam perjalanannya Kompas kerap kali mendapatkan kritikan dari para pengamat dan kelompok intelektual terutama terhadap usaha Kompas yang terus menerus melakukan ekspansi bisnis. Kompas dianggap telah mengaburkan batas antara idealisme dan komersialisme, padahal sebagai lembaga pers Kompas diharapkan dapat menjaga jarak dengan pemerintah agar tetap dapat terus mengawasi dan mengkritik pemerintah. Hingga dalam perjalanannya sampai saat ini, kritik dan perdebatan terhadap Kompas tidak pernah ada habisnya. Namun perlu diakui juga bahwasannya Kompas adalah lembaga pers yang telah mencatatkan dirinya sebagai salah satu lembaga pers terbesar dan paling sukses di Indonesia.

4. Debut Manis Republika

Keberadaan Republika tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam keberadaan politik Islam pada masa Orde Baru. Merupakan organisasi cendekiawan muslim yang pernah terpinggirkan oleh rezim pemerintahan Soeharto, peran ICMI dalam pembentukan budaya politik Indonesia tidak bisa disepelekan. Terlebih lagi ICMI merupakan organisasi yang mengatasmakan pemberdayaan umat sekaligus pers disaat yang bersamaan (Oetama, 2001, hal. 40).

Pada periode Januari 1993, Republika hadir sebagai sebuah surat kabar harian baru sekaligus menjawab tantangan yang dilontarkan para partisipan dalam seminar ICMI tahun 1991. Awal kemunculannya Republika adalah sebuah harian dengan orientasi bisnis, posisi politis yang cerdas dan jaringan koneksi yang baik. Dimotori oleh ICMI lewat yayasan Abdi Bangsa yang diketuai oleh Menteri Riset dan Teknologi B. J. Habibie dan dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa, harian ini mewakili konsep yang baru dan berani dalam produksi dan pemasaran surat kabar di Indonesia. Berkat dukungan ICMI, SIUPP segera diperoleh tanpa kesulitan berarti, lebih cepat ketimbang para pemohon izin lainnya yang tidak punya koneksi sebaik Republika. Dikabarkan presidenlah yang mengganti nama Republik yang pertama disodorkan menjadi Republika (Hill, 2011, hal. 155).

Pada saat itu ICMI menyadari bahwa ummat Islam seringkalah dalam bidang politik, karena lemah dalam pemikiran dan opini, karena itu maka didirikan juga CIDES (*Centre for Information and Development Studies*). Penerbitan Republika pun sebenarnya bertujuan untuk mengimbangi pers non-Islam di Indonesia sekaligus mengisi kekosongan yang ditinggalkan media-media Islam sebelumnya. Secara umum surat kabar ini sekuler dalam memilih liputan peristiwa dan masalah yang diangkat. Sekalipun demikian, harian ini secara ideologis menginformasikan nilai-nilai islami dengan cara serupa seperti Kompas dan Suara Pembaruan dengan muatan kristianinya.

Dalam usahanya menghasilkan surat kabar yang berkualitas, saat itu Republika coba menggandeng sejumlah intelektual dan jurnalis Islam paling berpengaruh pada saat itu. Dalam dewan pengawas kebijakan redaksi, duduk sejumlah tokoh terkemuka seperti Wakil Direktur Badan Pusat Statistik yang kerap jadi kolumnis *Tempo* Sucipto Wirosarjono, pendiri organisasi non pemerintah terpadang Lembaga Studi Pembangunan (LSP) Adi Sasono, Komentator politik Nurcholis Majid, serta sejumlah akademisi terkemuka seperti pakar politik M. Amien Rais dari Universitas Gadjah Mada, Profesor dari Universitas Indonesia Edi Sedyawati, Rektor Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Jakarta yang juga pakar hukum Islam Quraish Shihab, dan juga Dewan Komisaris yang mengawasi perusahaan induk PT. Abdi Bangsa, Wardiman Joyo negoro yang juga merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Sementara untuk bagian pimpinan redaksi Republika menunjuk Parni Hadi, mantan koresponden dan senior ANTARA yang melewati beberapa tahunnya di Jerman Barat (1979-1989). Di sekeliling Parni Hadi terdapat sederetan jurnalis profesional berpengalaman seperti Nasir Tamara (sempat bergabung dengan *Tempo*, *Sinar Harapan*, *Warta Ekonomi*) dan S. Sinansari Ecip (mantan koresponden *Tempo* dan dosen di Universitas Hasanudin Ujung Pandang). Stafnya terdiri dari aktivis-aktivis kunci dan anggota-anggota ICMI. Di kalangan staf redaktur dan jurnalis muda terdapat nama-nama seperti Zaim Uchrowi yang sempat bekerja di *Berita Buana*.

Republika dibangun dengan bantuan dana awal dari sejumlah pengusaha muslim. Nama beberapa tokoh seperti Tanri Abeng, eksekutif nomor wahid dari Bakrie Brother yang juga merupakan anggota dewan perusahaan produsen minuman keras Multi Bintang Indonesia (dulu Heineken) memberikan bimbingan manajerial bagi kepengurusan Republika. Diharapkan harian ini bisa menghindari kegagalan manajerial yang kerap terjadi dan menenggelamkan sejumlah surat kabar. Lima puluh satu persen saham ini dipegang ICMI, sementara 20 persen sisanya dimiliki para karyawan (sebagaimana digariskan oleh peraturan SIUPP). Di awal Februari 1993, surat kabar ini membuka kepada publik dengan mengubah 29 persen saham sisanya menjadi 2,9 juta lembar saham untuk dijual ke masyarakat. Ini merupakan langkah yang tergolong unik dan berani. Republika menjadi surat kabar pertama di Indonesia yang menjual sahamnya ke khalayak. Lembar-lembar saham tersebut, yang tidak bisa dijual kembali tanpa persetujuan perusahaan, hanya bisa dibeli kaum Muslim dengan batasan satu lembar saham seharga Rp 5000 untuk tiap keluarga. Kekuatan nyata surat kabar tampak jelas pada jajaran staf redaksi dan manajemennya. Yang jelas kelihatan adalah stempel sejumlah orang kuat Orde Baru. Republika menerjemahkan semua ini menjadi sekumpulan modal. Sekalipun proyeksi angka sirkulasi 500.000 yang sangat tidak realistis tersebut gagal dicapai pada akhir tahun 1993, Republika berhasil memantapkan diri sebagai pendaatang baru yang berhasil di tengah ketatnya kompetisi industri pers periode 1990-an. Bulan Agustus 1993, begitu penjualan mencapai 125.000, target akhir tahun kemudian direvisi 200.000. Sepanjang tahun 1993, surat kabar ini secara teratur menurunkan daftar panjang berisi nama-nama

sejumlah pembeli saham Republika. Ratusan bahkan ribuan diantaranya dibeli oleh Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) yang didirikan oleh Habibie. Di bulan Agustus Parni Hadi mengklaim 1,3 juta sahamnya, sedikit dibawah target 2,9 juta lembar, telah terjual habis (Hill, 2011, hal. 157).

Hadirnya Republika di berbagai kios surat kabar membangkitkan minat besar dikalangan pembaca surat kabar. Sejak pertama kali didirikan Republika menggunakan moto “Bukan sekedar menjual berita”. Bervisi menjadi media cetak terpadu berskala nasional yang dikelola secara professional Islami, sehingga berpengaruh dalam proses pencerdasan bangsa, kebudayaan, dan peningkatan keimanan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang baru. Sedangkan misinya: (1) pencerdasan bangsa melalui pendalaman wawasan yang berbasis komunitas melalui pemberitaan yang akurat, aktual, terpercaya, edukatif, serta membela keadilan dan kebenaran. (2) Meningkatkan dan menguatkan prestasi dan dedikasi individu menjadi sebuah tim sebagai kunci untuk perkembangan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan (Hamad, 2004, hal. 130).

Apabila dilihat dari berita yang diterbitkan, dapat disimpulkan ideologi Republika adalah Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keislaman, yang ingin menampilkan Islam dalam wajah moderat. Walaupun sebagai surat kabar Islam, Republika masih tergolong liberal dalam menyampaikan pemberitaan. Artinya ia lebih banyak mengedepankan inspirasi dengan tujuan penyadaran sosial yang selaras dengan aspirasi kontemporer seperti keterbukaan, pluralisme, dan kecanggihan teknologi.

Meskipun demikian, peranannya sebagai surat kabar Islami tetap terefleksikan dari rubrik-rubrik yang berisi agenda keIslaman, misalnya saja Kolom Hikmah, Doalog Jumat, dan beberapa rubrik lainnya. Karena kepemilikan saham PT Abdi Bangsa, yang didominasi oleh orang-orang ICMI, layaknya Erick Tohir, BJ Habibie, dan Adi Sasono, maka kehadiran Repubika dipandang lebih mencerminkan Islam dalam sisi politik dan kewirausahaan, sehingga kurang memperlihatkan nilai Islam dalam sisi yang fundamentalis.